

BAB IV
DAMPAK-DAMPAK KEJATUHAN KESULTANAN PALEMBANG
DARUSSALAM TERHADAP KEHIDUPAN KAUM PRIYAYI
PALEMBANG

Kesultanan Palembang Darussalam takluk dan menyerah tanpa syarat kepada Belanda yang menduduki keraton pada tanggal 1 Juli 1821. Dengan direbutnya keraton, Belanda sepenuhnya menguasai Palembang dan setelahnya Sultan Mahmud Badaruddin II melalui Batavia dua hari sesudah keraton dikuasai oleh Belanda. Banyak hal dampak runtuhnya Kesultanan Palembang Darussalam terhadap kehidupan kaum priyayi di Palembang, baik itu dari segi politik, sosial dan keagamaan, serta ekonomi.

A. Kehidupan Kaum Priyayi di Kota Palembang dalam Bidang Politik

Politik merupakan suatu unsur yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat baik pada masa kini maupun masa lalu. Politik menjadi sebuah kajian menarik dalam kehidupan masyarakat terutama kehidupan para kaum priyayi atau bangsawan di suatu kerajaan. Para kau priyayi atau bangsawan Palembang sendiri tidak dapat dilepaskan dari unsur poliitik. Keberadaan mereka dalam suatu sistem pemerintahan memiliki dampak di Kesultanan Palembang Darussalam. Berikut beberapa kehidupan kaum priyayi Palembang di bidang politik.

1. Pelemahan Posisi Priyayi dalam Kesultanan akibat Pengasingan Sultan Mahmud Badaruddin II ke Ternate

Kekuatan politik kaum priyayi melemah pada saat Kesultanan Palembang Darussalam menyerah tanpa syarat kepada Belanda. Dan disaat yang bersamaan pula, Sultan Mahmud Badaruddin II diasingkan ke Ternate sebagai tawanan. Tetapi sebelum itu, Sultan Mahmud Badaruddin II melakukan perundingan dengan sempat terjadi penundaan karena dengan alasan sultan ingin mengajak para istri, anak-anak, dan para pengikut setianya dan itu dikabulkan oleh De Kock.

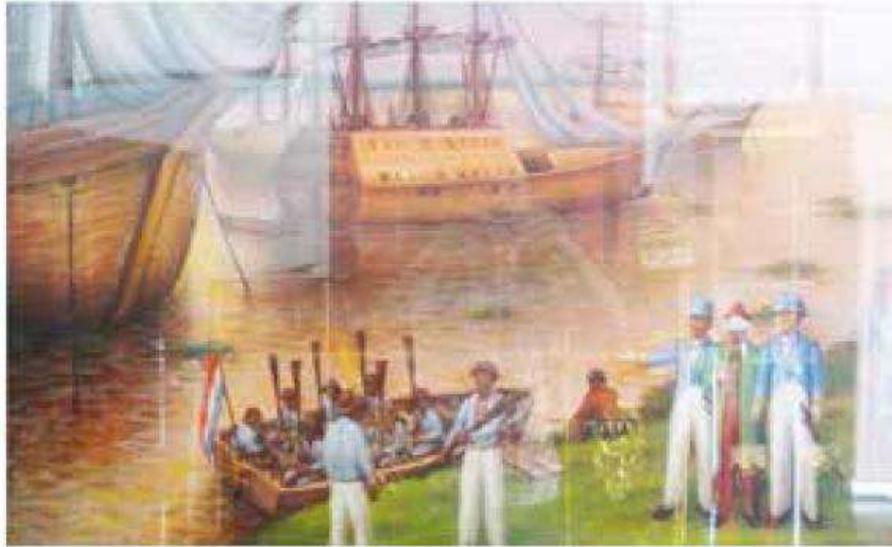
Sempat terjadi penundaan, sultan kembali mencoba memperpanjang waktu keberangkatannya, namun permintaan itu ditolak De Kock. Selanjutnya, ia mengutus Kapten Elout ke keraton untuk mendesak sultan memenuhi janjinya.¹ Pada 1 Juli 1821, pasukan Belanda menduduki keraton.² Dua hari kemudian Sultan Mahmud Badaruddin II dan kerabat dekatnya diberangkatkan ke Batavia menggunakan kapal perang *de Dageraad*,³ dan tiba di sana pada 29 Juli 1821. Pada Maret 1822, Sultan Mahmud Badaruddin II dan rombongannya diberangkatkan ke Ternate. Sebelum rombongan itu dibawa ke Ternate, semua harta benda yang mereka bawa disita pihak Belanda. Dengan demikian, sesampainya di Ternate mereka sudah tidak memiliki lagi kekayaan dan hidup

¹ Tim perumus hasil-hasil diskusi sejarah perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II, *Risalah Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II*, (Palembang: Pemprov Sumatera Selatan, 1981), hal. 34.

² Farida R. Wargadalem, *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik 1804-1825*, hal. 217.

³ Djohan Hanafiah, *Kuto Besak: Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan*, (Jakarta: Haji Masagung, 1989), hal. 108

mereka sepenuhnya tergantung pada tunjangan yang diberikan oleh pemerintah Belanda.⁴



Gambar 2.2.

Lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II di bawa ke kapal menuju ke tempat pengasingan
Sumber: Nawiyanto & Eko Crys Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darussalam: Sejarah dan Warisan Budayanya*, (Jember: Penerbit Tarutama Nusantara, 2016), hal. 41.

Setelah pembuangan Sultan Mahmud Badaruddin II, pemerintah Belanda di Palembang menyingkirkan semua orang terdekat Sultan Mahmud Badaruddin II. Kebijakan itu ditempuh Belanda karena mereka dianggap membahayakan kedudukan Belanda di Palembang. Sahabat-sahabat Sultan Mahmud Badaruddin II yang diasingkan Belanda adalah Pangeran Kramadiraja, Pangeran Wirosentika, Pangeran Yudo, Pangeran Puspodirejo, Tumenggung Wiroyudo dan Ingabehi Achmad Kretel. Dengan demikian, penyingkiran tersebut merupakan usaha Belanda untuk menghilangkan pengaruh Sultan Ahmad Badaruddin II dan para pengikutnya. Penyingkiran orang-orang yang dianggap membahayakan

⁴ Farida R. Wargadalem, *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik 1804-1825*, hal. 217.

kedudukan Belanda di Palembang benar-benar dilaksanakan dengan cara sistematis. Kebijakan itu ditempuh oleh Belanda tidak terlepas dari rasa takut yang berlebihan akan bangkitnya perlawanan terhadap Belanda pasca-dibuangnya Sultan Mahmud Badaruddin II.⁵

Sesampainya rombongan Sultan Mahmud Badaruddin II di Ternate pada tahun 1822, mereka ditempatkan di Fort Oranje, dengan tunjangan sebesar f. 800 per bulan. Fort Oranje adalah sebuah benteng Belanda di Ternate yang menjadi pusat pemerintahan Belanda di wilayah Maluku. Setelah beberapa bulan Sultan Mahmud Badaruddin II dan keluarganya menghuni benteng itu, residen setempat memandang perlu memperbaiki bangunan tersebut mengingat kondisinya yang memprihatinkan. Sebagai tindak lanjut, residen Ternate mengusulkan perbaikan gedung itu kepada pemerintah pusat. Usul itu diajukan melalui surat nomor 19, tertanggal 23 September 1822. Gubernur Jenderal menerima usul tersebut dengan mengeluarkan keputusan pada 13 November 1822 nomor 11. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Sultan Mahmud Badaruddin II dan pengikutnya dipindahkan ke lokasi sebelah selatan Fort Oranje dan tetap diawasi secara ketat. Fort Oranje diperuntukkan bagi markas komandan militer setempat. Selanjutnya, lokasi yang ditempati oleh Sultan Mahmud Badaruddin II dan pengikutnya dikenal dengan nama “Kampung Palembang”. Lokasi itu berbatasan sebelah utara dengan Fort Oranje, sebelah selatan dengan penjara, kantor residen, rumah kediaman residen, hotel, *societeit*, sekolah dan rumah para pejabat Belanda. Di sebelah timur berbatasan dengan pasar, rumah dan pertokoan Tionghoa. Di sebelah barat

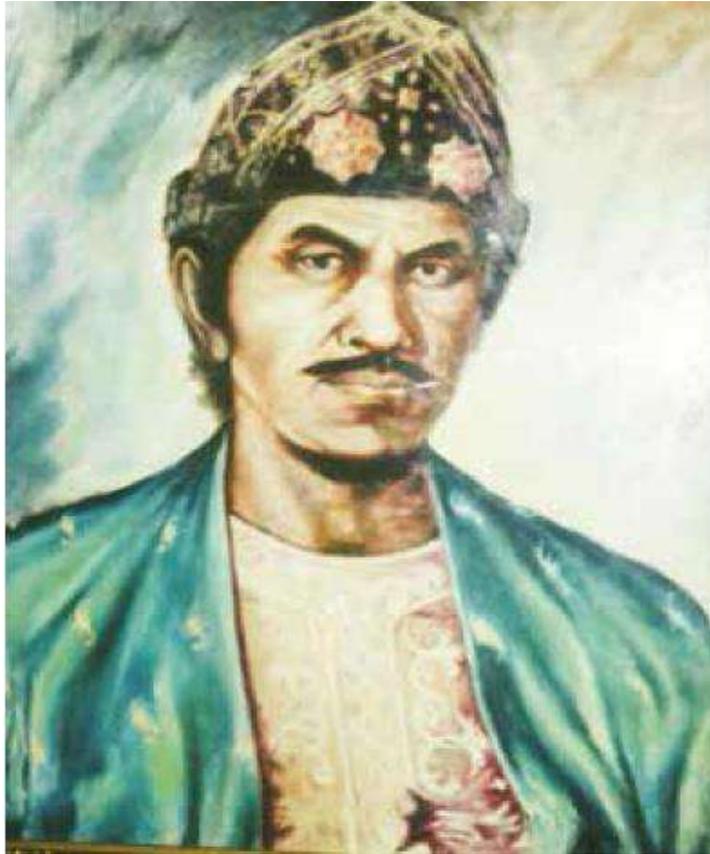
⁵ *Ibid.*, hal. 217

berbatasan dengan Kampung Sarani, yang dihuni oleh kelompok Belanda dan Portugis. Terdapat akses keluar dari lokasi tersebut, tetapi pihak Belanda telah menyiapkan pos penjagaan di sana.⁶

Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Godert Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen, melakukan kunjungan ke karesidenan Ternate pada 10 Mei 1824. Tiga hari setelah kunjungan resmi, sultan Tidore dan Ternate menemui Gubernur Jenderal. Pada 18 Mei 1824 Sultan Mahmud Badaruddin II diperkenankan menghadap Van der Capellen di sana. Pada kesempatan itu, Sultan Mahmud Badaruddin II mengakui kekalahannya, tetapi tidak sedikit pun mengajukan keinginan agar pemerintah kolonial Belanda mengizinkannya kembali ke Palembang. Sesungguhnya, Sultan Mahmud Badaruddin II memang terkenal sebagai raja yang memiliki sikap yang tegas dan keras. Di mata pers kolonial pada waktu itu, sultan dikenal angkuh dan nekad karena tidak memohon agar dapat dikembalikan ke Palembang. Dari pernyataan tersebut, tersirat bahwa Van der Capellen ingin agar Sultan Mahmud Badaruddin II memohon kepadanya agar diampuni dan dipulangkan ke asalnya. Ternyata semua keinginan itu tidak tercapai, karena Sultan Mahmud Badaruddin II tidak mau menghambakan dirinya demi sebuah “kebebasan dibawah kendali Belanda” di tanah leluhurnya Palembang.⁷

⁶ *Ibid.*, hal. 218-219.

⁷ *Ibid.*, hal. 219.



Gambar 2.3. Sultan Mahmud Badaruddin II
Sumber: Nawiyanto & Eko Crys Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darussalam: Sejarah dan Warisan Budayanya*, hal. 40.

Sultan Mahmud Badaruddin II dikenal rakyat Ternate sebagai sultan Ternate karena beliau semasa hayatnya memang diakui sebagai sultan sewaktu Kesultanan Ternate dikala itu sedang vacuum (dibuang Belanda). Khawatir akan pengaruh Sultan Mahmud Badaruddin II seperti keadaan beliau di Palembang, lalu buru-buru sultan Ternate dikembalikan.⁸ Keteguhan jiwa seorang sultan Palembang, yang dimiliki sejarah panjang dan berjuang mempertahankan kedaulatannya. Ia tidak pernah rela hidup dalam kungkungan penjajah Belanda.

⁸ Tim perumus hasil-hasil diskusi sejarah perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II, *Risalah Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II*, hal. 35.

Sepanjang sisa hidupnya, ia menghabiskan waktu selama 31 tahun sebagai orang buangan di Ternate. Ia wafat di sana pada 26 November 1852, dan dimakamkan di pemakaman umum kota Ternate.⁹

2. Perubahan Struktur Jabatan Kaum Priyayi Pada Masa Sultan Ahmad Najamuddin IV Prabu Anom

Sesudah jatuhnya kesultanan dan di masa Sultan Mahmud Badaruddin II diasingkan ke Ternate, pemerintah Belanda untuk sementara belum tertarik untuk langsung memerintah Palembang. Pemerintah Belanda sangat yakin terhadap kebijaksanaan prinsip bahwa selama keadaan mengizinkan untuk membiarkan rakyat pribumi untuk menjadi pemimpin, tetapi dibawah pemerintah Belanda.¹⁰ Sebagaimana yang kita ketahui bahwa priyayi ini jika di zaman kesultanan termasuk dalam lingkaran keraton, dan juga sama dengan pada zaman runtuhnya kesultanan.¹¹ Peran dari kaum priyayi lebih ke dalam bidang politik karena pemerintah Belanda mengangkat sebagian orang dari kaum priyayi ke dalam pemerintahan Belanda yang bisa bekerjasama.¹²

Dalam keputusan tersebut, Sultan Ahmad Najamuddin IV Prabu Anom menduduki takhta di Kesultanan Palembang yang baru selesai perang. Suatu kondisi serba kekurangan di segala bidang. Langkah awal yang diambil sultan

⁹ Farida R. Wargadalem, *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik 1804-1825*, hal. 219-220.

¹⁰ P. De Roo De Faille, *Dari Zaman Kesultanan Palembang*, terj. Soegarda Poerbakawatja, (Jakarta: Bhratara, 1971), hal. 51-52.

¹¹ Wawancara pribadi dengan Dedi Irwanto M. Santun (Sejarawan), Palembang pada tanggal 6 November 2021 Pukul 17.24.

¹² Wawancara pribadi dengan Kemas Ari Panji (Sejarawan), Palembang pada tanggal 3 November 2021 Pukul 16.28.

bersama dengan Susuhunan Husin Dhiauddin dan Jenderal Mayor De Kock adalah menata kembali pemerintahan di kesultanan itu. Masalah yang paling krusial pada waktu itu adalah keamanan. Untuk menangani masalah tersebut, De Kock menyerahkan kepada Letnan Kolonel Taets van Amerongen, Letnan laut klas-1 Koopman, dan perwira pertama kapal perang *van der Werf*. Pada 12 Juli 1812, De Kock menetapkan Letnan Kolonel Keer sebagai residen Palembang sekaligus menangani masalah militer. Kebijakan itu menyebabkan keamanan secara berangsur-angsur dapat ditegakkan khususnya di ibu kota Palembang.¹³

Keadaan keraton yang ditinggalkan oleh Sultan Mahmud Badaruddin II sangat memprihatinkan. Sebelum keraton diserahkan kepada De Kock, Sultan Mahmud Badaruddin II memerintahkan untuk menghancurkan benda-benda berharga dalam keraton, agar tidak jatuh ke tangan pasukan Belanda. Benda-benda yang tersisa hanya berupa beberapa keping uang, emas, buku-buku dan beberapa barang lainnya serta 74 pucuk meriam. Meriam-meriam itu digabungkan dengan meriam-meriam lain dari Gambora dan Plaju berjumlah dua ratus pucuk.¹⁴

¹³ Farida R. Wargadalem, *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik 1804-1825*, hal. 221-222.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 222.



Gambar 2.3. Sultan Ahmad Najamuddin IV Prabu Anom
Sumber: <https://keratonpalembang.com/sultan-palembang-darussalam-x-sepuluh/> artikel diakses pada tanggal 25 Oktober 2021 Pukul 21.52.

Pelantikan Sultan Ahmad Najamuddin IV Prabu Anom sebagai sultan Palembang, sedangkan ayahnya dilantik menjadi Susuhunan Husin Dhiauddin oleh Jenderal de Kock. Selesai pelantikan ini, kedua pimpinan yang baru tersebut membuat lagi pernyataan tertulis tentang apa yang telah mereka sepakati dalam perjanjian tertulis di Buitenzorg (Bogor) pada 28 April 1821.¹⁵ Susuhunan dilantik secara resmi pada 16 Juli 1821. Selanjutnya, *susuhunan* mengangkat menantunya yaitu Pangeran Adiwijaya sebagai juru bicaranya dengan gelar Pangeran Perdana Menteri. Dia juga memberi gelar Pangeran Adipati Tuo dengan nama Pangeran Bupati Panembahan. Putera *susuhunan* lainnya yaitu Pangeran Jayadiningrat diberi gelar Pangeran Dipati (sebelumnya Pangeran Jayadiningrat), sedangkan

¹⁵ Djohan Hanafiah, *Kuto Besak: Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan*, hal. 128.

adiknya Pangeran Jayakrama diberi gelar Pangeran Aryo Kesuma, serta adiknya yang terkecil naik menjadi Pangeran Suryo Kesuma (sebelumnya bergelar Pangeran Citradiningrat).¹⁶

Dalam rangka melaksanakan pendudukan atas Kesultanan Palembang secara efektif, pada 13 Juli 1821, panglima ekspedisi Palembang, Jenderal Mayor De Kock mengeluarkan instruksi kepada Residen Keer, agar segera mengambil langkah-langkah nyata. Lebih lanjut disebutkan bahwa hendaknya segera menata pemerintahan, infrastruktur, gelar dan jabatan di Kesultanan Palembang. Semua itu berpedoman pada nota salinan yang telah diberikan oleh Muntinghe.¹⁷

Setelah Sultan Ahmad Najamuddin IV Prabu Anom berkuasa, ia sulit menjalankan kewajibannya untuk mengatasi masalah gangguan keamanan, baik di ibu kota dan *uluhan*, maupun di perairan antara Pulau Bangka dan Palembang. Menurut pemerintah Belanda di Palembang pada waktu itu, sultan terlalu lemah untuk mengendalikan kondisi yang ada. Pada kenyataannya pemegang kendali pemerintahan adalah *susuhunan*. Oleh karena itu, untuk menegakkan keamanan di ibu kota Palembang, pemerintah Belanda menambah pasukan keamanan baik dari angkatan laut maupun darat. Di depan keraton Kuto Besak, mereka menempatkan kapal *Zeepard*, *Ajax*, *Venus*, *Zeevaluwe*, dan *Emma* serta perahu-perahu, dengan posisi yang telah ditentukan. Posisi kapal dan perahu itu tidak boleh berubah kecuali atas izin komandan angkatan laut. Kapal *Emma* dan beberapa perahu berfungsi untuk melayani pelayaran antara Palembang dan Muntok. Apabila kondisi Palembang sudah aman, akhir Oktober atau awal

¹⁶ Farida R. Wargadalem, *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik 1804-1825*, hal. 222.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 223.

November 1821, kapal *Ajax* dan *de Zwaluwe* akan ditarik ke Batavia. Meriam-meriam yang tidak digunakan secepatnya dikirim ke Jawa. Mereka juga membuat peta tentang sungai-sungai di Palembang, yang jumlahnya banyak. Pemetaan itu penting, mengingat sungai merupakan sarana transportasi utama di Kesultanan Palembang. Usaha itu juga untuk mengantisipasi kemungkinan perlawanan dari daerah *uluan* yang pasti memanfaatkan jalur sungai. Pelaksanaannya memanfaatkan bantuan sultan Palembang berupa perahu, pendayung dan penunjuk jalan dalam. Hal itu disebabkan hanya sultan yang memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dan hanya orang Palembang yang mampu menjadi penunjuk jalan dalam tugas tersebut.¹⁸

Selanjutnya kepemimpinan Belanda atas Kesultanan Palembang diserahkan kepada Komisararis Van Sevenhoven. Ia bertugas di Palembang sejak November 1821, melanjutkan pemerintahan sipil dari Letnan Kolonel Keer. Sejak awal pemerintahannya, Van Sevenhoven berhubungan dengan para bangsawan dan penduduk Palembang. Ia mendukung dipertahankannya kekuasaan sultan, namun pada kenyataannya tidak mudah mengembalikan kondisi Palembang pasca-perang. Kekacauan ini terjadi di pusat maupun *uluan*. Selanjutnya, Van Sevenhoven menugaskan pejabat sekretaris, J.E. Sturler, dan Asisten Residen D. Donker, untuk megemasi barang-barang milik Sultan Mahmud Badaruddin II. Barang-barang itu antara lain emas, naskah-naskah dan barang-barang lainnya yang berhasil ditemukan di keraton Palembang. Barang-barang itu dimasukkan ke

¹⁸ *Ibid.*, hal. 223-224.

dalam kotak dan disegel dengan cap pemerintah. Setelah kotak itu segera dikirimkan ke Batavia dengan menggunakan kapal perang *Zeepard*.¹⁹

Sebagai penguasa baru di wilayah yang sudah lama diidam-idamkan, pemerintah Belanda memperingati satu tahun kemenangan atas Kesultanan Palembang pada Senin, 24 Juni 1822. Peringatan pertama itu merupakan peringatan kemenangan yang mengharumkan bagi kekuatan armada laut Belanda di bawah pimpinan Jenderal Mayor De Kock. Suatu kemenangan yang sangat berarti bagi pemerintah Belanda di Palembang khususnya, dan Hindia Belanda umumnya. Palembang berhasil dikuasai, setelah tiga kali peperangan besar. Menduduki Palembang berarti menguasai seluruh wilayah kesultanan yang meliputi wilayah *kepungutan*, *sindang*, dan Bangka-Belitung. Peringatan dengan parade militer besar-besaran yang ditandai dengan tembakan penghormatan dari kapal perang *Arendt* dan parade pasukan Angkatan Darat. Peringatan kemenangan itu dihadiri para panglima Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Dalam peringatan kemenangan itu perwira militer dan pejabat sipil berbaris di pelabuhan untuk melakukan penghormatan terhadap kapal-kapal yang lewat. Mereka mewujudkan kegembiraan itu dengan membagi-bagikan botol anggur (masing-masing setengah botol anggur) kepada para anggota militer Eropa, sebagai penghargaan atas jasa-jasa mereka. Untuk seratus anggota militer pribumi diberikan hadiah seekor kerbau untuk dinikmati bersama dalam pesta tersebut. Pada upacara sore harinya dan jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh Komisariss Van Sevenhoven, mereka mengundang Susuhunan Husin Dhiauddin dan Sultan

¹⁹ *Ibid.*, hal. 224-225.

Ahmad Najamuddin IV Prabu Anom serta para *pangeran* dan para pemimpin orang Arab dan Tionghoa. Tidak ditemukan sumber nama dari tokoh Arab dan Tionghoa yang menghadiri peristiwa tersebut.²⁰

Tindak lanjut dari suatu pemerintah yang permanen, pemerintah Belanda membutuhkan sebuah benteng yang layak. Pemerintah Hindia Belanda mencanangkan membangun benteng Frederik di Palembang. Pembangunan diserahkan kepada Letnan Kolonel Insinyur Cochius (seorang ahli Benteng), yang diperkirakan akan memakan waktu selama empat tahun. Pembangunan benteng itu membutuhkan dana, material dan tenaga manusia yang sangat besar. Berdasarkan laporan Van Sevenhoven nomor 27, tertanggal 12 Juni 1822, kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, disebutkan bahwa besarnya kebutuhan untuk membangun benteng ini terdiri dari sembilan sampai 24 juta potong batu laut, 15 juta bata kecil, 68 ribu batu lantai ukuran besar dan kecil, 184 ribu genting, dan 250 ton kapur serta tiga puluh tunggu pencetak batu untuk waktu empat tahun. Langkah-langkah yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu: pertama, melaksanakan lelang, kedua, menyerahkan pengadaan semua kebutuhan kayu dan 350 orang kuli (total 600 orang kuli untuk membangun benteng) kepada sultan Palembang. Sisanya akan ditangani sendiri oleh pemerintah Belanda. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembangunan benteng tersebut antara lain, tidak adanya tanah yang cocok untuk pembuatan batu bata dan genting di sekitar ibu kota Palembang. Selain itu, disekitar ibu kota sulit diperoleh kayu bakar, kayu untuk bahan bangunan, dan 25.000 perahu untuk pembangunan selama empat

²⁰ *Ibid.*, hal. 226-227.

tahun. Semua kebutuhan tersebut harus didatangkan dari daerah-daerah lain, sehingga dibutuhkan sarana angkutan dan tenaga kerja tambahan (kuli angkut, kuli tebang kayu, tukang kayu dan tukang batu). Total tenaga kerja yang dibutuhkan lebih dari seribu orang per hari, sedangkan jumlah *matagawe* di Kesultanan Palembang hanya sekitar delapan ribu orang. Penduduk Palembang hanya mampu bekerja di proyek umum selama tiga bulan dalam setahun, karena mereka juga harus melakukan kerja harian di gudang-gudang milik Belanda, membersihkan jalan dan keraton. Dengan demikian, pemerintah Belanda akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kuli sebagaimana yang diharapkan.²¹

Atas pertimbangan berbagai kesulitan yang akan dihadapi apabila proyek pembangunan benteng Frederik diteruskan, Van Sevenhoven menyatakan keberatannya kepada Gubernur Jenderal. Menurutnya, apabila pembangunan benteng itu dipaksakan, akan timbul gejolak di Kesultanan Palembang. Sebagai gantinya, Van Sevenhoven menyodorkan keraton Kuto Besak untuk dijadikan benteng. Pada waktu itu keraton telah dijadikan tempat untuk pasukan Belanda. Lebih lanjut Van Sevenhoven menyatakan bahwa keraton Kuto Besak sangat sesuai untuk dijadikan benteng yang mampu menampung 400 orang serdadu. Bangunan di bagian tengah keraton cocok dijadikan tempat tinggal Van Sevenhoven. Di dekat keraton cocok untuk dibangun tempat beristirahat para perwira dan pejabat tinggi Belanda di Palembang. Dilihat dari berbagai segi

²¹ *Ibid.*, hal. 227-228.

keraton sangai memadai untuk dijadikan benteng. Di samping besar dan kokoh, keraton juga berada di posisi yang sangat strategis.²²

Pada mulanya Jenderal Mayor De Kock menyatakan persetujuannya atas rencana pembangunan benteng Frederik. Ia tidak memikirkan kesulitan-kesulitan yang akan timbul dalam pembangunan benteng itu, antara lain kebutuhan tenaga kerja, material dan dana, sedangkan keraton Lamo (dekat keraton Kuto Besak), yang pada saat itu dihuni Van Sevenhoven, kondisinya telah rapuh dan gelap. Kondisi itu juga membutuhkan penanganan segera. Sementara itu, banyak hal yang harus dilakukan guna membenahi keraton Kuto Besak. Berdasarkan hasil penelitian Kapten Van der Wijck terhadap keraton Kuto Besak (termaktub dalam memori pada 28 Juni 1822), dinyatakan bahwa sarana pertahanan keraton belum memadai untuk dijadikan benteng sebagai pengganti benteng Frederik. Akan tetapi, jika pembangunan benteng Frederik dilanjutkan akan terbentur dana yang sangat besar. Jalan yang terbaik adalah menggunakan salah satu bagian dari keraton sebagai benteng. Cara itu dinilai baik dan lebih hemat tenaga kerja, material dan biaya.²³

Berdasarkan paparan Van Sevenhoven yang menyeluruh tentang berbagai kemungkinan mewujudkan benteng dengan biaya serendah mungkin, ditopang pula dengan kondisi keraton Kuto Besak sebagai satu-satunya bangunan yang paling kokoh dan terletak di lokasi yang sangat strategis, Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal De Kock mengubah pikirannya yang sebelumnya mendukung pembangunan benteng Frederik, menjadi menyetujui menjadikan

²² *Ibid.*, hal. 228.

²³ *Ibid.*, hal. 228-229.

keraton sebagai benteng. Selanjutnya, gubernur jenderal mengeluarkan keputusan tentang penetapan keraton Palembang sebagai benteng pertahanan. Tujuannya untuk melindungi para pejabat dan garnizun Belanda dari serangan penduduk. Suatu kesalahan besar apabila residen dan para pegawai sipil tinggal di luar benteng. Untuk itu, gubernur jenderal memerintahkan komisaris Palembang melaksanakan proyek tersebut bersama-sama dengan Kapten Insinyur Van der Wijck. Dalam mewujudkan rencana tersebut, mereka juga meminta persetujuan dari sultan Palembang. Setelah segala persiapan selesai, pembangunan segera dilaksanakan.²⁴

Sebagai residen Palembang, Van Sevenhoven tetap memilih untuk tinggal di luar keraton Kuto Besak, yaitu di keraton Kuto Lamo (sebelah keraton Kuto Besak), yang dihuninya sejak ia bertugas di Kesultanan Palembang. Tampaknya Van Sevenhoven berubah pikiran dari keinginan awal untuk menghuni keraton Kuto Besak, menjadi tetap mendiami tempat semula yaitu keraton Kuto Lamo. Hal itu dilakukan karena kondisi keamanan di Palembang saat itu cukup kondusif. Di samping itu, pengamanan kediamannya menjadi satu kesatuan dengan keraton Kuto Besak. Hal itu juga merujuk pada kebiasaan para residen Belanda di Pulau Jawa dan Makassar yang menetap di luar benteng. Menurut Van Sevenhoven, agar seorang residen dapat menjalankan tugasnya dengan baik, hendaknya semua kebutuhan residen dipenuhi dengan baik, khususnya tempat tinggal. Sebagai penguasa atas nama pemerintah Hindia Belanda di daerah, sudah selayaknya rumah residen berupa bangunan besar dengan pemandangan yang indah dan

²⁴ *Ibid.*, hal. 229.

berada di lokasi strategis. Tempat yang paling pas untuk itu adalah keraton Kuto Lamo yang berlokasi di sebelah keraton Kuto Besak. Pemandangannya sangat indah, yaitu Sungai Musi yang lebar, mampu dilayari oleh berbagai jenis kapal dan perahu dengan berbagai ukuran. Dalam pandangan Van Sevenhoven, kondisi seperti itu akan membuat seorang residen betah tinggal di tempat tersebut dan akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Hal ini karena setiap pemindahan seorang residen akan merugikan kepentingan pemerintah Belanda dan residen itu sendiri. Dibutuhkan waktu lama bagi seorang residen baru untuk mengenal medan tempatnya bertugas dan itu merupakan suatu pemborosan. Sementara itu, rumah yang dihuninya saat itu adalah keraton Kuto Lamo yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Untuk itu, lokasi yang sama hendaknya dibangun rumah residen yang layak. Akhirnya, pemerintah Belanda sepakat untuk menghancurkan bangunan lama dan menggantikannya dengan bangunan baru yang megah. Bangunan itu yang nantinya menjadi kantor dan rumah Residen Van Sevenhoven dan residen-residen setelahnya.²⁵

Pada perkembangan pemerintah Hindia Belanda semakin banyak campur tangan dalam berbagai persoalan di Kesultanan Palembang. Hal itu tidak terlepas dari semakin maraknya pelanggaran dan perlawanan terhadap berbagai ketentuan pemerintah di sejumlah daerah di Kesultanan Palembang. Menghadapi hal tersebut, sultan tidak mampu berbuat banyak, karena tidak memiliki sarana dan prasarana. Menghadapi hal tersebut, pemerintah Belanda di Palembang memandang perlu untuk ikut campur langsung dalam pemerintah, khususnya di

²⁵ *Ibid.*, hal. 229-230.

uluan. Usaha tersebut sekaligus untuk meningkatkan pendapatan. Selanjutnya, Van Sevenhoven menyampaikan usulan kepada pemerintah di Batavia pada Juli 1822. Atas dasar usul tersebut, pada 9 Oktober 1822, dibuat kontrak sementara dengan Sultan Ahmad Najamuddin IV Prabu Anom, yang intinya memuat tentang ketidakmampuan sultan menjalankan kontrak April 1821. Selanjutnya, pada Mei 1823, Van Sevenhoven menyerahkan laporan yang memuat penilaian tentang pemerintahan dan pelaksanaan sistem baru di Kesultanan Palembang. akhirnya, atas dasar kontrak 9 Oktober 1822, pemerintah Hindia Belanda, pada 3 Juli 1823, membuat kesepakatan dengan sultan. Hasilnya, pada 18 Agustus 1823, dibuat kontrak antara Sultan Ahmad Najamuddin IV Prabu Anom dan pemerintah kolonial Belanda. Kesepakatan itu disahkan pemerintah Hindia Belanda pada September 1823. Dinyatakan bahwa kekuasaan sultan Palembang, baik di bidang pemerintahan, keamanan, peradilan dan pajak, dihapuskan. Sultan hanya berkuasa di bidang peradilan agama, yang menangani masalah perkawinan, perceraian dan waris. Pelaksanaan tugas tersebut diserahkan kepada seorang *pangeran*. Apabila suatu perkara penanganannya tidak dapat diselesaikan oleh pejabat yang bersangkutan, perkara tersebut diperbolehkan naik banding kepada sultan. Di samping itu, sultan akan memperoleh penghasilan berupa gaji bulanan sebesar 1.000 dolar Spanyol, dengan ditambah kenaikan gaji mencapai 500 dolar Spanyol. Para bangsawan juga akan mendapat tunjangan yang besarnya belum ditetapkan, yang akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah Belanda pada

waktu itu. Lebih lanjut disebutkan, bahwa sultan diperbolehkan duduk dalam pengadilan sipil di bawah pejabat pemerintah Belanda.²⁶

Inilah riwayat Kesultanan Palembang setelah perjalanan panjang selama sebelas tahun, sejak kemelut pertama dengan naiknya Pangeran Adipati menggantikan kakaknya Sultan Mahmud Badaruddin II pada 1812. Keinginan untuk berkuasa kembali di kerajaan itu, membuat Sultan Ahmad Najamuddin II dan puteranya memanfaatkan peluang melalui kontrak pertama dengan Belanda (April 1821). Hanya membutuhkan waktu dua tahun bagi *susuhunan* dan sultan untuk berkuasa di Kesultanan Palembang, mereka sudah harus kehilangan semua kekuasaan kecuali yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum Islam. Dalam masa pemerintahan mereka yang singkat, keduanya cenderung hanya berkuasa sebagai simbol. Faktanya yang justru merekalah yang ditunggangi sehingga semua kekuasaan yang mereka miliki satu persatu dilucuti.²⁷

Untuk melaksanakan tugas-tugas harian Kesultanan Palembang, pemerintah Belanda mengangkat Pangeran Kramajaya (menantu Sultan Mahmud Badaruddin II) sebagai perdana menteri. Tugas itu mulai diembannya pada 5 September 1823, setelah disumpah di hadapan Komisaris Van Sevenhoven di dalam keraton Palembang. Pelimpahan kekuasaan itu menuntut kemampuan untuk mengendalikan wilayah Kesultanan Palembang yang sangat luas. Tanpa pemerintahan yang kuat, mustahil kekuasaan Belanda di daerah tersebut dapat berjalan dengan baik. Posisi Pangeran Kramajaya hanyalah pegawai yang digaji.

²⁶ *Ibid.*, hal. 230-231.

²⁷ *Ibid.*, hal. 231-232.

Pengangkatannya semata-mata untuk memudahkan pihak kolonial Belanda untuk mengendalikan penduduk Palembang yang masih bersifat primordial.²⁸

Pasca-penyerahan kekuasaan kepada pemerintah Belanda, berkembang berbagai wacana tentang masa depan Palembang. Salah satunya yang dikemukakan oleh Reynst dan Kruseman (pejabat semasa Komisaris Van Sevenhoven). Keduanya berpendapat bahwa sebaiknya pemerintah Belanda tetap menggunakan penguasa pribumi (sultan dan beberapa orang *pangeran*) sebagai perantara dalam menjalankan pemerintahan. Untuk itu, perlu ada kesepakatan dengan sultan untuk mengatur pemerintahan dan membatasi kekuasaannya. Strategi pemerintahan seperti itu dapat menekan biaya pelaksanaan pemerintahan di daerah itu menjadi sekitar f. 200-300.000 per tahun dengan keuntungan tahunan mencapai f. 4.000. Hal itu bisa dicapai dengan catatan “gaji” (uang pengakuan) untuk sultan dikurangi. Pemerintah Belanda mutlak merencanakan secara matang, sebelum melakukan perubahan besar atas Palembang yang terkenal subur dan padat penduduknya. Pemerintah Belanda di sana harus mendirikan sebuah benteng kecil tanpa armada laut, untuk memudahkan mengendalikan keamanan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah menggabungkan daerah Bengkulu yang berbatasan dengan Palembang, guna memudahkan mengamankan daerah tersebut. Mengingat sejarah panjang kawasan tersebut sebagai daerah yang senantiasa bergolak, dengan terjadinya perampokan, penjarahan, dan perdagangan manusia. Akan tetapi usul-usul itu ditolak gubernur jenderal pada 14 November 1823. Menurut penguasa Belanda itu, program penghematan yang akan dijalankan di

²⁸ *Ibid.*, hal. 232.

Palembang adalah mengurangi jumlah pasukan dan pangkalan armada, sedangkan untuk menambah pemasukan, langkah yang akan diambil adalah memberlakukan pajak atas tanah dan perluasan pertanian.²⁹

Kebijakan tersebut menjadi acuan dalam melaksanakan pemerintahan Belanda di Palembang. Dengan mengurangi pasukan, mengingat kondisi sudah cukup aman, biaya untuk serdadu dapat ditekan. Begitu pula dengan pengurangan pangkalan armada, berarti biaya pengeluaran dapat diminimalisir. Sesuai saran Van Sevenhoven, di Palembang diberlakukan pajak atas tanah yang akan memberikan keuntungan yang berlipat ganda, mengingat tanah di Kesultanan Palembang sangat luas dan subur. Hal itu juga sangat menguntungkan jika pertanian diperluas.³⁰

Di lain pihak, di berbagai daerah di *uluan* Palembang, terjadi gangguan keamanan dalam berbagai bentuk, misalnya penyerangan dan perampokan yang dilakukan oleh orang-orang Pasemah. Pada waktu itu berkembang pula berita tentang perlawanan yang menolak pungutan pajak tanah. Penolakan terhadap pungutan pajak terjadi di daerah Lematang. Akibatnya, Deputi Muin sebagai penguasa daerah itu, pada April 1824, diganti dengan Pangeran Suradiwangsa. Daerah-daerah lain di *uluan* juga bergolak, antara lain di Ogan dan Rawas. Untuk itu, pada 17 Juni 1824, Residen Reynst di Palembang mengutus asisten residen di *uluan*, H. De Sturler dan Demang Astramenggala ke *uluan*.³¹

Daerah Rawas selama kurun 1823-1824 secara nyata menolak membayar pajak dengan melakukan berbagai kerusuhan. Pada 29 Juli 1824, Said Hamzah

²⁹ *Ibid.*, hal. 232-233.

³⁰ *Ibid.*, hal. 233.

³¹ *Ibid.*, hal. 234.

(orang Arab dari dusun Sarolangun) bersama-sama dengan Abdulmanan dan Khatib Kedin berhasil mengajak penduduk untuk memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda. Menyikapi masalah tersebut, pemerintah Belanda sepakat untuk mengirimkan tujuh puluh orang serdadu pribumi di bawah pimpinan Pangeran Suradilaga dan Karanga (Rangga) Wirasentika ke Rawas pada 4 Agustus 1824. Hal itu ditempuh setelah usaha mereka untuk membawa tokoh-tokoh pemberontak tersebut untuk diadili di ibu kota mengalami kegagalan. Di samping itu, dikirim pula pasukan, persenjataan dan perbekalan serta sepuluh perahu di bawah Pangeran Puspadiraja dan Kerangga Setawijaya (*depati* Rawas). Pasukan Pangeran Suradilaga juga membawa hadiah-hadiah berupa pakaian dan ikat kepala untuk dibagikan kepada para *depati* di sana. Tujuannya adalah untuk menarik simpati mereka dan bersedia mendukung pemerintah kolonial Belanda. Dalam menjalankan misinya, Pangeran Suradilaga juga menerapkan tradisi yang berlangsung semasa sultan-sultan Palembang melakukan kunjungan ke daerah *uluan*. Tradisi itu adalah dusun-dusun yang dilewati oleh *pangeran* itu ikut menyertakan penduduknya guna memperkuat rombongan tersebut. Di samping itu, terlibat pula beberapa orang tokoh dari keraton, antara lain Pangeran Kramayudo, Raden Mohammad Said, Raden Sabudin, Demang Wiratama, Demang Walo Sentiko Adenan, Kiagus Kling bin Tanjung, Kiagus Kling, Pangelima Tama, Pangelima Dalam, dan Nakuda Kahar. Pemerintah Belanda juga meminta tambahan pasukan militer dari Pulau Bangka.³²

³² *Ibid.*, hal. 234-235.

Dilihat dari persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, baik personil maupun peralatan persenjataan, dapat disimpulkan bahwa mereka menanggapi perlawanan dari penduduk *uluan* dengan serius. Pihak Belanda sudah banyak belajar dari pengalaman selama ini, bahwa sekecil apa pun suatu pembangkangan harus dihadapi dengan penuh kewaspadaan. Sebab penduduk Palembang terkenal militan dan dapat melakukan serangan secara tiba-tiba tanpa mereka mampu memprediksikannya sebelumnya. Ekspedisi yang dipimpin Pangeran Suradilaga berhadapan dengan pasukan Rawas. Pertempuran terjadi di sana, yang sebagian besar melibatkan sesama penduduk Palembang. dalam pertempuran itu, jumlah pemberontak Rawas jauh lebih besar dari yang diperkirakan semula. Akibatnya pasukan yang dipimpin Pangeran Suradilaga tidak mampu mengatasi keadaan dan terpaksa mundur ke ibu kota. Dengan demikian, penyerahan kekuasaan dari sultan kepada pemerintah Belanda diikuti berbagai peraturan yang menekan penduduk, misalnya pajak. Yang menyebabkan penduduk *uluan* memberontak.³³

3. Munculnya Perlawanan dari Kaum Priyayi

Berbagai bentuk perlawanan di *uluan* tidak dapat dilepaskan dari usaha Sultan Ahmad Najamuddin IV Prabu Anom untuk mengobarkan perlawanan terhadap pemerintah Belanda yang didukung oleh para ulama setempat. Sultan dan *susuhunan* juga dihadapkan pada kekecewaan lain, yaitu dikeluarkannya komisararis Palembang pada 24 September 1824 No. 119. Dalam surat keputusan

³³ *Ibid.*, hal. 235.

itu disebutkan bahwa pasal 46 Kontrak 28 April 1821 belum diputuskan secara khusus. Oleh karena itu, jatah garam untuk sultan dan *susuhunan* yang seharusnya sebanyak lima belas koyang, akan diberikan setengahnya. Keputusan tersebut membuat sultan dan *susuhunan* semakin menumpuk rasa kecewa terhadap pemerintah Belanda. Perasaan sakit hati itu berkembang menjadi keinginan untuk melepaskan diri.³⁴

Rasa tidak puas yang menumpuk baik di ibu kota maupun di *uluan*, memberi peluang terwujud dalam bentuk rasa kekecewaan yang memuncak. Berita tentang kondisi *uluan* yang bergolak menyebar ke ibu kota Palembang pada akhir Oktober dan awal November 1824. Menghadapi situasi di Residen Reynst meminta klarifikasi kepada Sultan Ahmad Najamuddin IV Prabu Anom dan Susuhunan Husin Dhiauddin. Ia menuntut agar sultan menghukum para penyebar isu yang tidak bertanggungjawab tersebut. Untuk itu, sultan menyatakan kesanggupannya dalam dua kali kunjungannya menemui residen.³⁵

Berbagai peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kolonial Belanda di Palembang memiliki gambaran yang sama sekali berbeda tentang para pemimpin, rakyat dan alam Palembang. Mereka berpikir bahwa apabila ibu kota Palembang telah berhasil dikuasai, akan dengan mudah menguasai daerah *uluan*. Ternyata perkiraan itu dalam pelaksanaannya jauh berbeda. Terbukti mereka dihadapkan pada berbagai perlawanan, termasuk perlawanan dari daerah Rawas dan Ogan. Di Ogan pemberontakan dikobarkan oleh para ulama. Mereka menolak membayar pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah Belanda. Perlawanan itu

³⁴ *Ibid.*, hal. 235-236.

³⁵ *Ibid.*, hal. 236.

dipadankan dengan pengiriman beberapa pejabat Palembang untuk berunding dengan para *depati* di sana. Apabila tidak berhasil, pasukan penaklukan akan dikirimkan ke sana. Pengiriman ekspedisi militer ke berbagai daerah di *uluan* tidak membuat perlawanan itu mereda. Sebaliknya, perlawanan semakin berkembang dan meluas ke daerah-daerah lain di Kesultanan Palembang. satu hal yang sangat ditakutkan oleh pemerintah Belanda adalah bersatunya *pasirah* Bliti dan Klingi untuk melawan penguasa kolonial. Oleh karena itu, mereka berusaha bersungguh-sungguh agar hal itu tidak terjadi dengan cara mencegah terjadinya perpindahan penduduk dari kedua wilayah tersebut. Bliti dan Klingi memiliki sejarah yang panjang dengan perlawanan terhadap Belanda. Penduduk setempat, sejak mundurnya Sultan Mahmud Badaruddin II ke sana pada tahun 1812 meneruskan perjuangan melawan Inggris dan Sultan Ahmad Najamuddin II. Begitu pula enam tahun kemudian, ketika Muntinghe bersama pasukannya tetap di sana setelah menghalau pasukan Inggris. Kawasan tersebut menjadi pendukung setia Sultan Mahmud Badaruddin II dan sangat gigih melawan pendudukan asing.³⁶

Situasi di ibu kota Palembang makin tegang. Untuk itu, pemerintah kolonial Belanda menyiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan. Langkah yang ditempuh ialah mengerahkan pasukan dari Muntok, dan mendatangkan kapal perang *Dolphijn* di bawah pimpinan Kapten-Letnan Bloemendal. Kapal itu sudah berada di perairan Sungai Musi pada November, dan tetap di sana hingga

³⁶ *Ibid.*, hal. 236.

Desember 1824. Akan tetapi, kehadiran kapal perang dan tambahan serdadu tidak membuat kondisi di ibu kota menjadi kondusif.³⁷

Terbukti pada 21 November 1824 pukul 04.00 di kala fajar belum merekah, terdengar lengkingan dan teriakan peperangan yang membahayakan di luar keraton Kuto Besak di sebelah *ulu*. Kurang lebih 400 orang priyayi dan penduduk Palembang di bawah pimpinan Sultan Ahmad Najamuddin IV Prabu Anom, sultan Palembang terakhir, menyerbu Kuto Besak. Tampaknya serbuan ini bagai satu “dadakan”, tetapi kenyataannya Sultan Ahmad Najamuddin IV Prabu Anom “bak ikan masuk bubu”. Sebab serbuan ini memang telah ditunggu dan diharapkan oleh pihak Belanda. Kali ini Belanda yang berada di dalam Kuto Besak, ironisnya cucu pendiri Kuto Besak berada di luar Kuto Besak dan ingin merebutnya kembali. Tragisnya di bagian dalam Kuto Besak ada pula cucu lain dari pendiri Kuto Besak. Peristiwa ini diceritakan oleh naskah tulisan tangan Palembang sebagai berikut:

Syahdan setelah pukul 04.00 maka berjalanlah angkatan Sultan itu dengan beberapa priyayi-priyayi dan haji-haji semuanya lengkaplah dengan membawa senjata yang sudah terhunus, serta dengan bunyi zikirullah dan mengucap selawat atas Nabi dan tahlil. Maka gemuruhlah bunyinya. Maka malam itu terlalu gelap, tiada kelihatan apa-apa, serta turun hujan rintik-rintik. Yaitu malam itu pada dua puluh sembilan Rabi’ul-awal tahun seribu dua ratus empat puluh betul, 1240, maka sampailah angkatan itu ke hadapan kuto. Maka Panglima Batuapi membedil dengan pemuras, menuju pintu kuto, empat ratus banyaknya membedil sama sekali, tiada berdiam lagi. Dan meriam di atas kuto pun berbunyi dan meriam kapal juga di laut pun berbunyi. Maka Pangeran Putang, penghulu anak itu, masuk laren besar serta keluar sudah di belakang soldadu, bersama dengan Haji

³⁷ *Ibid.*, hal. 237.

Jabaruddin. Maka ia mengamuklah. Setelah beramuk masing-masing membawa dirinya. Dan adalah rakyat Sultan yang mati Pangeran Putang dan Raden Zuber dan Khatib Jabaruddin dan si Luncuk, pinakawan Sultan. Maka Sultan itu larinya ke Suakbata, hari pun teranglah. Setelah abislah amuk itu, tiada ketahuan lagi kemana perginya.

.Pasukan sultan terjebak di antara tembakan dari kapal-kapal yang berada di depan Kuto Besak dan dari dalam Kuto Besak. Menurut J.B.J van Doren, 2 orang pengawal Belanda mati dan 23 orang serdadu mednerita luka buat Belanda korban ini tidak begiu berarti sebab dengan aksi Sultan Ahmad Najamuddin IV Prabu Anom ini maka kehendak Belanda menghapuskan kesultanan bertambah kuat alasannya. Residen mencurigai pelakunya adalah salah seorang pengawal Sultan Ahmad Najamuddin IV Prabu Anom.³⁸

Dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut, residen mengirim beberapa orang utusan untuk menangkap pelaku. Akan tetapi, setibanya petugas-petugas tersebut di kediaman sultan, mereka ditangkap dan dipenjarakan atas perintah Sultan. Sore harinya, Susuhunan Husin Dhiauddin mengundang semua pejabat kesultanan yang di tempatkan di kantor residen. Sebagian besar pejabat tersebut memenuhi undangan itu, kecuali beberapa orang yang mendapat tugas dari residen. Setibanya para pejabat itu di rumah *susuhunan*, ia memerintahkan untuk menangkap para pejabat tersebut, bahkan salah satu dari pejabat yang terlibat dalam pertemuan tersebut dcederai karena berusaha melarikan diri. Menghadapi insiden tersebut, residen Palembang menuntut Sultan Ahmad Najamuddin IV Prabu Anom agar segera mengirimkan orang kepercayaan untuk menghadap dirinya. Sultan tidak memberitahukan tuntutan tersebut, bahkan

³⁸ Djohan Hanafiah, *Kuto Besak: Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan*, hal. 126.

menahan petugas yang membawa pesan dari residen. Sultan memperingatkan residen bahwa malam itu juga ia akan menyerang kediaman residen.³⁹

Menghadapi situasi seperti itu, residen menyiagakan para serdadu angkatan darat dan laut serta armada. Pada 22 November 1824, pukul empat pagi, setelah lonceng benteng berdentang, sebanyak tiga hingga empat ratus orang keluar dari rumah sultan mendekati keraton. Dalam kegelapan malam pasukan Belanda mengenali suara sultan yang memimpin penyerangan dan suara para serdadunya. Sambil meneriakkan *Sabil Allah* (berjuang demi Allah) pasukan sultan maju menyerang pertahanan Belanda. Terjadi pertempuran selama hampir satu jam. Peperangan berakhir setelah pasukan sultan menarik diri. Pasukan Belanda tidak mengejar pasukan sultan karena gelap. Pagi harinya ditemukan tujuh mayat pasukan sultan termasuk Pangeran Citrawijaya di keraton Kuto Besak. Akan tetapi, berita yang berkembang pada waktu itu adalah jumlah yang terbunuh mencapai dua puluh hingga tiga puluhan orang dari pihak sultan. Sedangkan dari pihak Belanda sebanyak dua puluh tiga orang serdadu yang terluka, termasuk dua orang yang kemudian meninggal.⁴⁰

Dua jam setelah pertempuran berakhir, para pejabat yang ditahan oleh *susuhunan* diizinkan kembali ke keraton. Sebelum mereka kembali ke keraton, ia meminta kepada mereka untuk menyampaikan permintaan maaf atas nama diri dan puteranya kepada residen Palembang. Mereka berjanji akan menyerahkan senjata yang dimilikinya kepada residen. Dari berbagai tindakan Sultan Ahmad Najamuddin IV Prabu Anom tampak bahwa sultan telah melakukan kecerobohan

³⁹ Farida R. Wargadalem, *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik 1804-1825*, hal. 237.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 237-238.

dan kenakadan dalam serangan itu. Pada umumnya perlawanan yang dilakukan oleh para penguasa Kesultanan Palembang selalu dipersiapkan dengan matang. Tindakan yang ditempuh oleh sultan menunjukkan bahwa ia telah melakukannya dengan keragu-raguan. Beberapa hari sebelum penyerangan itu terjadi sudah menjadi rahasia umum bahwa sultan akan melakukan penyerangan. Otomatis berita itu mendorong pihak Belanda mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan yang direncanakan tersebut, sedangkan sultan hanya memiliki senjata berupa meriam-meriam yang hanya layak untuk tembakan penghormatan. Padahal jarak keraton dengan rumah sultan hanya satu tembakan senapan. Artinya, apa yang terjadi di kedua lokasi tersebut akan dengan cepat diketahui oleh mereka masing-masing. Hanya dengan tembakan meriam-meriam dari benteng residen ke rumah sultan, kediaman sultan dapat dengan mudah dihancurkan.⁴¹

Selanjutnya Residen Reynst memerintahkan *susuhunan* dan sultan untuk meninggalkan Palembang menuju Batavia. Keputusan itu disampaikan Reynst melalui Pangeran Bupati Panembahan dan Pangeran Depati Muda Abdulrachman (dua saudara *susuhunan*). *Susuhunan* menerima perintah itu. Ia dan empat belas orang lainnya (para istri, anak-anak dan pengiringnya), pada 24 November 1824, berlayar ke Batavia menumpang kapal layar *Wilhelmina* dengan pengawalan militer. Mereka tiba di Batavia pada 6 Desember 1824. Selama di Batavia mereka ditampung di balai kota. Berbeda dengan *susuhunan* yang mematuhi perintah residen, Sultan Ahmad Najamuddin IV Prabu Anom menolak keputusan tersebut. Sultan bersama para pengikutnya meninggalkan ibu kota Palembang mundur ke

⁴¹ *Ibid.*, hal. 238.

uluan. Pasukan Belanda mengerahkan semua kekuatan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Van Castel guna mencegah sultan mencapai Rawas. Pihak Belanda tidak menginginkan bergabungnya kekuatan sultan dengan penduduk Rawas. Apabila hal itu terjadi kedudukan Belanda sangat berbahaya. Sementara itu, *susuhunan* tidak lama hidup sebagai buangan di Batavia. Ia jatuh sakit dan wafat di rumah salah seorang ulama pada 21 Februari 1825. Berita itu diketahui residen Palembang pada 28 Februari 1825. Seluruh biaya pemakamannya ditanggung pemerintah Belanda, sedangkan para istri, anak-anak dan para pengikut almarhum *susuhunan* serta semua hartanya yang tersisa dikirim ke Palembang. Dengan demikian, sejak *susuhunan* wafat, tidak ada lagi keluarga dan pengikutnya yang tinggal di Batavia.⁴²

Dari *uluan*, Sultan Ahmad Najamuddin IV Prabu Anom mengobarkan perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Sultan bergabung dengan perlawanan yang sudah berlangsung sebelumnya di Rawas, yang dipimpin oleh Said Hamzah. Setelah keberangkatannya sultan ke *uluan* dan *susuhunan* ke Batavia, harta kekayaan sultan dan pengikutnya dihancurkan begitu pula bangunan-bangunannya diratakan dengan tanah atau dibakar. Untuk meredam kekuatan sultan, pemerintah Belanda memerintahkan Asisten Residen H. De Sturler membawa seratus orang serdadu ke *uluan*. Dalam menjalankan tugasnya, ia dibantu oleh Letnan Shirjner dan Kapten Lameer/Lammers. Dapat diketahui bahwa untuk menyukseskan misinya, H. De Sturler menepuh berbagai cara, antara lain mengerahkan semua *pancalang* untuk memperlancar mobilitas di sungai dengan pasukan yang besar.

⁴² *Ibid.*, hal. 239.

Sturler juga memanfaatkan para bangsawan dan para *depati* di *uluan* untuk terlibat dalam ekspedisi itu. Bangsawan yang terlibat dalam ekspedisi adalah Pangeran Adipati Abdulrahman, Pangeran Suradilaga, Pangeran Purbayo, Demang Buncul, Tumenggung Kartanegara, Raden Muin dan Kranggaunut. Dari *uluan* yang terlibat adalah Pangeran Pulau Panggung. Sturler juga memerintahkan para *pasirah* dan *proatin* di *uluan* agar membujuk sultan untuk menyerahkan diri kepada pemerintah Belanda. Cara lain yang ditempuhnya adalah menggunakan jasa mata-mata, contohnya memanfaatkan Raden Mohammad (cucu Pangeran Natadiraja) sebagai mata-mata.⁴³

Semuanya dikerahkan untuk menggagalkan perlawanan sultan. Tampak bahwa pihak Belanda tidak mau mengambil resiko. Jangan sampai perlawanan sultan berlarut-larut dan mendapat dukungan besar dari penduduk *uluan*. Untuk itu, pihak Belanda menempuh berbagai cara agar secepatnya berhasil melumpuhkan perlawanan sultan, termasuk menjalankan politik adu domba keluarga keraton dengan iming-iming harta dan jabatan jika berhasil menangkap sultan.⁴⁴

Pada saat ekspedisi dimulai, pasukan sultan telah tiba di Pan Rejang bersama lima puluh orang pengikutnya. Dari sana sultan bermaksud menuju Rawas dan Kikim. Sewaktu berada di Rawas, sultan mendapat serangan dari pasukan Belanda di bawah pimpinan Pangeran Suradilaga dan Kranggaunut. Dalam peperangan itu, sultan berhasil memukul mundur pasukan Palembang. walaupun demikian, dengan adanya ekspedisi itu, kekuatan sultan di Rawas

⁴³ *Ibid.*, hal. 239-240.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 240.

semakin lemah. Selanjutnya, sultan bergerak ke Kikim. Di sana ia mendapat banyak bantuan dari Demang Rema Bonjol (Pangeran Bajau). Di Kikim, sultan mendirikan kubu pertahanan. Setelah itu, ia bersama dengan Demang Rema Bonjol menghimpun dukungan dari orang-orang Pasemah dan penduduk setempat. Akan tetapi, selanjutnya orang-orang Pasemah menarik dukungan mereka terhadap sultan dan membunuh Demang Rema Bonjol. Peristiwa itu terjadi karena dihasut anggota pasukan Belanda. Betapa rapuh kekuatan yang dihimpun sultan, sehingga sultan sulit mengembangkan diri dan kondisi itu diperparah dengan tidak adanya dukungan sarana dan prasarana. Sultan cenderung hanya untuk mengandalkan kesetiaan segelintir orang.⁴⁵

Ekspedisi lain untuk mengejar sultan adalah pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Purbayo. Ia mendarat di Pelawe bersama 130 orang serdadu. Dari Pelawe Pangeran Purbayo mengirimkan utusan Si Blewak untuk menemui sultan. Sesampainya disana Si Blewak ditahan oleh sultan selama beberapa waktu, tetapi kemudian dilepaskan. Berdasarkan informasi Si Blewak kepada Sturler, mereka dapat mengetahui kekuatan persenjataan, serdadu dan gerak mundur sultan menuju Bengkulu. Sementara itu, komandan militer Belanda di Palembang memberi instruksi kepada Sturler bahwa tujuan utama ekspedisi adalah menangkap sultan dan memulihkan ketenangan di Rawas. Akan tetapi, Sturler mempunyai pendapat yang berbeda. Menurutnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah menaklukkan Rawas. Setelah misi itu berhasil, langkah berikutnya adalah mengejar sultan. Jika mereka lebih mengutamakan mengejar

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 240-241.

sultan dengan meninggalkan musuh di belakang, bukan mustahil sultan melalui pengikutnya memperkuat kedudukan di Rawas. Daerah itu akan tetap berada dalam kondisi darurat yang akan membahayakan kedudukan Belanda. Akan tetapi, sampai saat itu usaha mereka untuk menaklukkan Rawas belum juga berhasil.⁴⁶

Pada awal Agustus 1825 Residen Reynst kembali mengirimkan pasukan ke *uluan*. Pengiriman pasukan kali itu membuat posisi sultan makin terdesak. Ia tidak banyak mendapat dukungan dari penduduk *uluan*, bahkan sebagian besar meninggalkannya. Akibatnya, sultan tidak mampu lagi meneruskan perlawanan dan menyerah. Setelah sultan ditangkap, pemerintah Belanda memutuskan untuk tidak lagi mengirimkan kesatuan militer ke *uluan*. Bagi mereka langkah terbaik adalah mendirikan pos-pos penjagaan yang akan memantau kondisi keamanan di sana. Selanjutnya, sultan bersama dengan empat belas tawanan lainnya dikirim ke Batavia menggunakan kapal perang *Lijnx*. Pengadilan Palembang telah memutuskan bahwa sultan dijatuhi hukuman buang dan kerja paksa. Ia harus diperlakukan sebagai raja tawanan, tidak boleh melakukan apa pun dan berbicara dengan orang lain. Semua orang buangan dirantai termasuk saudara sultan.⁴⁷ Pada November 1825, Sultan Ahmad Najamuddin IV Prabu Anom dibawa ke Batavia dan dibuang ke Banda dan pada akhirnya dipindahkan ke Manado. Di sana ia mendapat tunjangan sebesar f. 30 per bulan. Akan tetapi, di sana ia dianggap

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 241.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 241-242.

membahayakan sehingga pada 1841 dipindahkan ke Manado sampai akhir hayatnya pada 1844.⁴⁸

B. Kehidupan Kaum Priyayi di Kota Palembang dalam Bidang Sosial Keagamaan

Seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, adanya peran dari kaum priyayi ini muncul karena sebagian dari mereka diangkat menjadi orang penting dalam pemerintahan Belanda, dan sama halnya dengan sosial keagamaan.⁴⁹ Tetapi menjadi pertanyaan yang sekarang timbul, kelompok manakah yang paling banyak beruntung dari vakum sosial yang diciptakan oleh degradasi kaum priyayi Palembang? Adapun kelompok tarekat-tarekat serta gerakan perlawanan yang ada pada zaman Karesidenan Palembang, antara lain:

1. Perkembangan Tarekat di Palembang

Walaupun penjajah Belanda telah berhasil menduduki kota Palembang secara militer, kita tidak boleh berasumsi bahwa orang Belanda kini menguasai kehidupan sosial di kota Palembang. Koloni Belanda di kota Palembang, yang pada pertengahan abad ke-19 hanya terdiri atas “17 kediaman Eropa”, dan sampai tahun 1870 tidak pernah melebihi batas 200 orang, sebenarnya terlalu kecil untuk menjadi golongan sosial yang dominan. Bagi masyarakat kota pada tahun 1856 berpenduduk lebih dari 40.000 orang, jumlah orang Belanda ini memang tidak

⁴⁸ Djohan Hanafiah, *Kuto Besak: Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan*, hal. 129.

⁴⁹ Wawancara pribadi dengan Kemas Ari Panji (Sejarawan), Palembang pada tanggal 3 November 2021 Pukul 16.28.

berarti. Malah jika dibandingkan dengan golongan priyayi, yang terdiri atas lebih dari 1.000 orang, jumlah orang Belanda di Palembang, termasuk wanita dan anak-anak, tidak terlalu mengesankan.⁵⁰

Walaupun Belanda tidak berhasil menguasai semua aspek kehidupan sosial di masyarakat Palembang, impuls untuk perubahan sosial-budaya datang juga dari luar. Arus migrasi dari Hadramaut ke Asia Tenggara sudah mencapai Palembang sejak triwulan terakhir abad ke-18. Perkembangan ekonomi kesultanan pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Bahauddin (1775-1804), yang ditopang oleh maju pesatnya tambang timah di Pulau Bangka dan ekspor lada dari pedalaman Palembang, menjadikan Palembang pelabuhan yang menarik sebagai tempat tinggal pedagang dari seberang lautan. Akibatnya, pada akhir zaman kesultanan, jumlah orang Arab yang menetap di Palembang telah mencapai jumlah 500 orang lebih. Di pelabuhan Palembang, pendatang Arab sebagai mitra baru dalam perdagangan memperbolehkan pedagang Arab untuk membangun gudang mereka di darat. Juga di lingkungan keraton orang Arab dari Hadramaut mempunyai kedudukan khusus. Orang Belanda yang pernah mengunjungi keraton Palembang menyaksikan, bahwa jika pembesar kerajaan menghadapi raja, mereka harus menyembah sampai menyentuh lantai, sedangkan orang Arab boleh duduk di kursi di sisi sultan. Juga dari segi hukum orang Arab juga hampir kebal, mereka jarang dituntut atau dihukum.⁵¹

Selama abad ke-19, orang Hadramaut juga mencoba untuk mengubah laba materiil yang diperoleh dari perdagangan menjadi prestise sosial. Kehidupan sosial

⁵⁰ Jeroen Peeters, *Kaum Mudo-Kaum Tuo Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*, hal. 14-15.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 15.

di Palembang makin dikuasai oleh masyarakat pedagang Arab yang secara berangsur-angsur mendesak kaum priyayi Palembang dari puncak piramida sosial. Di sini kita perlu memperhatikan aspek lainnya.⁵²

Strategi agama Alawiyin pertama-tama ditunjukkan kepada penduduk kampung yang tergantung pada modal sayid. Nasib pedagang perantara di kota Palembang terutama tergantung dari pemberian uang muka oleh orang Arab yang kaya. Di pertengahan abad ke-19, golongan pedagang yang terdiri dari pemborong dan pedagang perantara merupakan kategori pekerja yang paling besar di kalangan penduduk kota. Dengan menyediakan kredit untuk pedagang, saudagar Arab mempunyai jaringan klien yang luas. Di samping itu, banyak Alawiyin menjadi pemilik toko dan rumah di kota Palembang yang mereka sewakan kepada orang Palembang, dengan syarat bahwa anak mereka harus mengikuti pelajaran agama di langgar yang dibangun pelindung mereka. Akibat siasat budaya ini, penduduk Palembang dari strata sosial yang lebih rendah dipaksa mengikuti pola kebudayaan religius dari golongan atas.⁵³

Meskipun pengaruh sayid atas pola kebudayaan orang Palembang cukup besar, dalam beberapa hal praktek agama para Alawiyin menyimpang dari penduduk pribumi. Sesuai dengan organisasi keluarga Ba'Alawi, tarekat ini mempunyai cabang lain, seperti Alaydrusiyah, Alatasiyah dan Alhadadiyah. Para Alawiyin biasanya lebih suka bergabung dengan tarekat Alawiyah. Dengan

⁵² *Ibid.*, hal. 17.

⁵³ *Ibid.*, hal. 21.

demikian, tarekat ini memperoleh sifat khusus, dan mencerminkan kebutuhan di kalangan sayid untuk memisahkan diri dari golongan awam.⁵⁴

Sifat eksklusif tarekat Alawiyah mencegah sayid untuk berperan dalam penyebaran tarekat lain. Di Palembang, vakum spiritual ini selanjutnya diisi oleh tarekat Sammaniyah. Nama tarekat ini berasal dari nama pendirinya Syekh Muhammad Abdulkarim Samman. Tarekat Sammaniyah kemudian berkembang ke Sumatera Selatan. Aneka silsilah Sammaniyah di Palembang, sesudah Abdulsamad al-Palimbani menyebutkan nama Kiagus H. Muhammad Akib. Sebenarnya bagaimana hubungan antara Sammaniyah dan istana pada zaman kesultanan? Sayangnya narasumber yang tersedia sangat fragmentaris. Tetapi, terdapat cukup banyak petunjuk yang membenarkan pandangan, adanya hubungan erat antara sultan Palembang dan tarekat ini. Salah satunya dijumpai dalam versi Hikayat Syekh Muhammad Samad, ini disebutkan sebuah zawiat yang didirikan Sultan Mahmud Bahauddin sebagai wakafnya pada tahun 1776.⁵⁵

Tarekat Sammaniyah sangat melekat di zaman kesultanan, oleh sebab itu para sultan Palembang mempunyai peranan penting sebagai pelindung Sammaniyah. Runtuhnya keraton pada tahun 1821 mengakhiri pula hubungan erat antara negara dan agama. Akan tetapi, runtuhnya kesultanan bukan berarti bubarnya Sammaniyah. Untuk priyayi Palembang, tarekat ini justru menjadi kerangka alternatif pengganti masyarakat keraton. Fungsi sosial ini sesudah tahun 1821 terutama dikembangkan oleh Panembahan Bupati, saudara laki-laki Sultan

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 22.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 23.

Mahmud Badaruddin II dan Sultan Ahmad Najamuddin II, yang diizinkan tinggal di Palembang.⁵⁶

Sebagai satu-satunya mantan pembesar keraton, Panembahan Bupati menerima pensiun Nlg. 600 sebulan, yang memungkinkan memelihara suatu jaringan sosial yang luas di sekitar kediamannya di dekat keraton di kampung 27 ilir. Terpencil dari tiap kegiatan politik, Panembahan Bupati selanjutnya bertindak sebagai pelindung agama. Tidak diragukan lagi usaha Panembahan Bupati dapat dikaitkan dengan tarekat Sammaniyah umumnya dan Syekh H. Muhammad Akib khususnya. Nama H. Muhammad Akib baru pertama kali disebut dalam Laporan Belanda tahun 1834, sebagai guru agama (di bidang hukum Islam) dengan jumlah murid terbesar di Palembang. Kemudian pada tahun 1840an namanya muncul lagi, ketika “perayaan agama” yang dibiayai Panembahan Bupati, dan dipimpin oleh H. Muhammad Akib mulai menimbulkan kecurigaan Belanda yang melihat ritual agama ini hanya sebagai kedok bagi para pengikut panembahan agar dapat berkumpul di halaman pelindung politik mereka. Para pemeran utama ini, yang sampai tahun 1850 menguasai pentas agama dan politik di kota, akan lenyap dari panggung sejarah dalam waktu sepuluh tahun. Tentang Panembahan Bupati, pelindung yang terkemuka, terdapat informasi dari tahun 1858, yang mengatakan bahwa beliau telah menjadi pikun dan sesudah itu peran politiknya berakhir. Pada akhirnya Panembahan Bupati meninggal dan berakhir pula zaman perlindungan agama di kalangan priyayi.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 24.

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 25

2. Munculnya Pan-Islamisme Pada Kaum Priyayi

Kekuatan agama, ekonomi dan politik kini dicampuri menjadi bahan yang eksploif, yang akhirnya meledak pada bulan Agustus 1881. Akan tetapi, sebelum hal ini benar-benar berakhir dengan pengasingan keturunan Sultan Mahmud Badaruddin II, masih perlu diperkenalkan pakem dan dalangnya. Satu-satunya uraian tentang pemberontakan tahun 1881 yang dimiliki, adalah Laporan Residen Palembang, P.P. Laging Tobias. Keterbatasan sumber demikian menjadi jelas bila diteliti membaca versi kejadian. Pegawai pemerintah ini tentu saja menulis kepada atasannya di Batavia dengan maksud membela tingkah lakunya sendiri, sedangkan tentu dipengaruhi kearifan yang datang kemudian. Dengan membaca tidak hanya yang tersurat tapi juga yang tersirat, berbagai pertanyaan muncul tentang maksud dan motif pemberontakan. Pertanyaan yang sayangnya tidak dapat dijawab karena tidak adanya bacaan alternatif. Terpaksa, kita harus puas dengan penuturan kembali “fakta” yang diperoleh dari versi resmi yang jelas menyuarakan pendapat penguasa.⁵⁸

Suasana politik penuh ketegangan terjadi, ketika Palembang pada awal tahun 1881 tiba-tiba dikunjungi dua orang syekh dari Mekkah. Tamu pertama ialah seorang Turki, yang sempat menarik banyak perhatian masyarakat Palembang. Ketika ditanya polisi, ia menyatakan bernama Abdul Malik dan berasal dari Thessalia, daerah yang pada tahun yang sama diserahkan Kerajaan Ottoman kepada Yunani. Menurut keterangannya sendiri, ia pergi ke Asia Tenggara sebagai pelarian untuk mencari nafkah sebagai pedagang. Sesudah

⁵⁸ Ibid., hal. 27.

polisi mendapat informasi rahasia, diketahui tamu ini sebenarnya bernama H. Mustafa dan berasal dari Mekkah, memiliki fungsi militer, sehingga banyak orang Palembang menganggapnya sebagai utusan Sultan Turki. Kunjungan singkat Abdul Malik alias H. Mustafa ke Palembang pada 25 Maret 1881 diikuti kedatangan seorang bernama Abdul Wahid, yang mengakui pernah melakukan dinas militer dalam tentara Ottoman dan dihargai dengan berbagai dekorasi militer karena jasanya dalam perang Turki-Rusia tahun 1878-1879. Berbagai haji dari Palembang sudah mengenal syekh orang Arab ini di Mekkah, ketika ia memandu jemaah dari Sumatera. Pada tanggal 7 April 1881, ia berangkat lagi, dan muncul kembali di Palembang dari 24 April sampai 31 Mei 1881, sesudah itu ia bertolak ke Singapura.⁵⁹

Kunjungan kedua syekh ini tidak akan disebutkan di sini, jika keduanya tidak dapat dihubungkan dengan usaha sultan Kerajaan Ottoman yaitu Sultan Abdulhamid II untuk memperkuat statusnya sebagai khalifah seluruh umat Islam. Usaha pertama Kerajaan Ottoman untuk memperoleh pengaruh terhadap umat Islam di Asia Tenggara mulai pada tahun 1864. Pada tahun itu, Abdullah Aljunied, seorang sayid asal Hadramaut di Singapura, diangkat sebagai konsul Kerajaan Ottoman. Ketika ia meninggal tahun 1865, lowongan ini tidak diisi lagi. Kerajaan Ottoman sebenarnya ingin mengangkat saudara Abdullah, Sayid Juned Aljunied, sebagai konsul kedua, tetapi Inggris berhasil mencegah pengangkatan ini dengan melakukan tekanan yang diperlukan atas Istanbul. Meskipun tanpa penegasan resmi, ia dianggap sebagai wakil tidak resmi khalifah semua orang

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 27.

beriman. Tetapi, ikatan dengan kaum muslim di Asia lebih dieratkan, ketika Prancis pada tahun 1881 menduduki Tunis. Kekalahan politik ini dicoba diganti oleh Sultan Abdulhamid II dengan menuntut kepemimpinan seluruh umat Islam atas nama dirinya sendiri. Kekhalifahan kemudian dipropagandakan dengan penuh kesadaran sebagai alat pengikat semua muslim melawan imperiaslisme barat yang bergerak maju. Untuk menyebarkan pikiran ini ke seluruh pelosok dunia Islam, Abdulhamid II mencari hubungan dengan jaringan translokal tarekat.⁶⁰

Tidak diduga-duga propaganda Sultan Turki mendapat respon besar di kalangan keturunan sultan Palembang, yang memanfaatkan koneksi dengan kerajaan Utsmani untuk memperbaiki kedudukan terkemuka mereka yang sedang pudar. Pemimpin gerakan ini ialah seorang bernama Syarif Abdullah Assegaf. Hubungan ini terjadi dengan perantaraan Sayid Juned Aljuneid, yang di Singapura secara tidak resmi bertindak sebagai konsul Turki dan menikah dengan saudara perempuan Syarif Abdullah. Berkat perkawinan ini, Syarif Abdullah menjadi perantara utusan Sultan Turki di Palembang di kalangan priyayi. Ayahnya, Sayid Umar Abdullah, termasuk rombongan Sultan Mahmud Badaruddin II selama pembuangannya di Ternate, tempat ia menjadi guru agama masyarakat kecil kampung Palembang di Ternate. Di sana ia kawin dengan putri Sultan Mahmud Badaruddin II, yang bernama Raden Ayu Asima, sehingga Syarif Abdullah, putranya juga memilhara ikatan keluarga dengan keturunan lain dari sultan lewat ibunya. Sesudah mereka diizinkan kembali ke Palembang, pada usia muda

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 27-28.

keluarganya mengirim Syarif Abdullah ke Hadramaut. Pendidikannya di Timur Tengah diakhirinya dengan latihan para-militer pada tentara Utsmani. Sekembalinya dari Mekkah, pada awalnya ia menetap di Singapura sebagai pedagang, dan menikah dengan anak perempuan salah seorang Alawiyin dari Malaka. Ketika keadaan ekonominya di Singapura tidak lagi menguntungkan, ia pindah ke Palembang atas undangan anggota keluarga Sultan Mahmud Badaruddin II dan segera mengambil-alih pimpinan faksi ningrat ini. Supaya ikatannya dengan keluarga raja lebih jelas, atas anjuran ibunya yang ambisius, ia juga dengan seenaknya mulai memakai gelar raden. Sebagai seorang sayid sebenarnya ia tidak berhak memakainya, dan pemakaian gelar ganda ini menyebabkan ia tidak disukai kalangan priyayi lain, yang tidak bersedia mengakuinya sebagai raden.⁶¹

Dengan bantuan Raden Syarif Abdullah, kedua syekh Turki ini mulai memobilisasi keturunan Sultan Mahmud Badaruddin II dengan sangat rahasia. Tidak ada kepastian, tapi besar kemungkinan pertemuan diadakan untuk berdzikir. Menurut keturunan Syarif Abdullah, yang sekarang di Manado, para priyayi yang ikut serta adalah pengikut tarekat Naksyabandiahh yang merupakan wadah gerakan tersebut. Supaya tidak menarik perhatian, pertemuan ini diadakan bergantian di pinggir kota di Pulau Seribu, di tepi kiri Ogan, dan di Talang Semut. Barangkali kita tidak pernah akan pernah mengetahui dengan pasti, apakah Raden Syarif Abdullah Assegaf atau kedua syekh, betul-betul mempersiapkan pemberontakan sewaktu bulan puasa tahun 1881. Mungkin ia tidak sama sekali

⁶¹ *Ibid.*, hal. 28

bermaksud demikian, atau membiarkan diri diseret arus bawah, yang pasti bahwa persaingan intern di kalangan priyayi menyebabkan kejatuhannya, sehingga musuh-musuh pribadinya dapat mengambil manfaat. Pertemuan di Talang Semut tentu tidak dapat disembunyikan terhadap priyayi lain, yang akhirnya mengetahui kegiatan rahasia di kalangan cucu-cucu lelaki Sultan Mahmud Badaruddin II. Pada akhir bulan Juni, jaksa melapor kepada asisten residen polisi, bahwa Raden Muhammad Ali, mantan pegawai polisi menceritakan kepadanya bahwa priyayi sejak beberapa waktu mengadakan rapat rahasia tidak jauh dari kota, di rumah seorang bernama Timur, yang pernah menjadi pembantu para priyayi di Ternate. Maksud pertemuan ini adalah rencana rahasia menyerang dan merebut benteng Belanda. Rencana ini kabarnya akan dilaksanakan tatkala bulan puasa mendatang, dan serangan akan dipimpin oleh Raden Emuk Abdassamad bin Raden Acim bin Pangeran H. Krama Nandita. Akan tetapi, Raden Muhammad Ali tidak bersedia menyebut sumbernya. Sebagai saksi kedua ditunjukkan Raden Umar bin Pangeran Perdana Menteri, yang semula mengikuti pertemuan ini, namun segera berhenti sebab tidak menyukai sifat rahasianya. Ketika ditanya jaksa, raden ini juga tidak dapat bercerita lebih banyak. Sementara itu, para pemimpin pertemuan sudah pergi ke Singapura dan Lahat dan baru akan kembali pada bulan Ramadhan. Sebagai organisator ditunjuk Raden Syarif Abdullah di samping tiga cucu lelaki lain Sultan Mahmud Badaruddin II, yakni Raden Zainal Abidin, Raden Mat Aji, Raden Tating alias Abdurachman, putra Raden Muhammad Hanafiah dan Raden Emuk Abdassamad bin Raden Acim bin Pangeran H. Krama Nandita.⁶²

⁶² *Ibid.*, hal. 28-29.

Kabar angin demikian sudah cukup menimbulkan rasa takut pemerintahan Belanda yang mendalam. Residen Palembang, Laging Tobias, menafsirkan perjalanan yang direncanakan kedua pemimpin ke Lahat dan Singapura sebagai usaha mencari bantuan di dalam maupun di luar negeri. Dari Lahat orang dapat mengusahakan agar penduduk di pedalaman memberontak, sedangkan Singapura tampaknya tempat ideal untuk mengadakan kontrak rahasia dengan pihak perlawanan di Jambi dan dengan demikian meneruskan berita kepada Sultan Taha. tampaknya diperlukan tindakan cepat. Akan tetapi, penangkapan besar-besaran dari semua tersangka tampaknya riskan sekali. Di Palembang tinggal lebih dari 400 priyayi pria yang terdaftar dalam register pajak, yang sebagian besar tinggal di dekat keraton di kampung 27 dan 28 ilir. Mengingat perselisihan umum tentang memasuki lingkungan ini. Faktor yang tidak diketahui terutama sikap penduduk kampung biasa, yang mungkin melawan penangkapan bekas pelindung mereka. Untuk menghindarkan pertemuan bersenjata, disusun rencana kampanye lain. Agar menentramkan priyayi, residen memutuskan mempercayai juru tulisnya, Raden Bakhtiar. Dengan pura-pura akrab, ditanyakan apakah dia juga pernah mendengar segala cerita burung tentang pemberontakan. Sesudah ingkar yang pertama, residen dengan acuh tak acuh berkata kepadanya, bahwa ia sendiri juga sama sekali tidak mempercayai kabar burung itu, dan bahwa kedatangan kapal perang Borneo, sekedar dimaksudkan untuk menentramkan hati masyarakat Eropa.⁶³

⁶³ *Ibid.*, hal. 29.

Sesudah informasi ini diteruskan kepada priyayi tersangka, dipikirkan rencana untuk memancing raden ini keluar dari kampung mereka. Kembali Raden Bakhtiar dipakai sebagai perantara. Kali ini sepintas lalu diberitahukan hasil rembukan dengan komandan militer, yang berkesimpulan, bahwa semua kabar ini semata-mata berdasarkan percakapan tidak penting para musuh keturunan sultan. Para tersangka disebut dengan nama dan residen malah terkejut mengeluarkan perkataan kepada Raden Bakhtiar, bahwa kedengarannya ia juga termasuk komplotan. Tetapi, hal ini diceritakan begitu ramah sehingga para hadirin ketawa dengan gembira. Dalam usaha melenyapkan kesalahpahaman selama-lamanya, priyayi pada hari berikut diundang menghadap di ruang pengadilan negeri. Pada kesempatan ini mereka akan bersumpah bahwa sama sekali tidak mengetahui tentang komplotan. Ketika esok harinya Raden Bakhtiar sesuai dengan janji datang melapor bahwa semua priyayi yang bersangkutan sudah berkumpul dengan rapi, didapatinya Residen Palembang di atas kursi penderita sakit. Dengan sandiwara seperlunya residen bercerita bahwa ia telah jatuh sakit tadi malam, kepalanya dibalut dengan kain sebagai bukti, di atas meja kecil di samping terletak beberapa botol obat. Dalam keadaan ini, upacara menghadap tidak dapat dilangsungkan. Ketika Raden Bakhtiar hendak pergi, residen mempunyai akal dan mengundang priyayi ke rumahnya. Dengan hati tentram, Raden Bakhtiar pergi memanggil yang lain. Begitu utusan itu pergi, residen mengganti pakaian dan bergabung dengan komandan militer, untuk menanti priyayi yang akan melewati benteng menuju rumah residen. Sementara itu, di jalan masuk ke benteng ditempatkan satuan bersenjata, sedangkan di balik tembok benteng, bersembunyi

sisia pasukan. Ketika kelompok priyayi mendekati gerbang benteng menuju rumah residen, jalan kembali ditutup untuk mereka. Perintah pertama untuk menyerahkan diri diabaikan. Baru ketika Residen Palembang tiba-tiba muncul di jalan bersenjata pistol, kekacauan yang ditimbulkan tindakan ini begitu besar sehingga priyayi kemudian dapat ditangkap.⁶⁴

C. Kehidupan Kaumm Priyayi di Kota Palembang dalam Bidang Ekonomi

Sejak Sultan Ahmad Najamuddin IV Prabu Anom di buang ke Banda dan Manado, kedudukan sultan berakhir. Selanjutnya, pemerintahan di Palembang hanya dipegang oleh seseorang perdana menteri yang bertanggungjawab kepada residen. Pemerintah Belanda membuat kebijakan memberikan uang pensiun kepada sejumlah bangsawan atau priyayi, keturunan sultan-sultan Palembang. Para anggota kerabat sultan membentuk kelompok kerabat tersendiri, yang itu berkaitan dengan adat istiadat di Kesultanan Palembang. Pelan tapi pasti, para keturunan sultan mengalami kemiskinan seiring berakhirnya Kesultanan Palembang. Harta kekayaan mereka secara bertahap semakin menipis, sedangkan uang pensiun yang diterima dari pemerintah Belanda tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka. Kondisi itu menimbulkan perasaan tidak puas di kalangan bangsawan, yang makin lama semakin meningkat dan berujung pada usaha untuk melepaskan diri dalam bentuk pemberontakan.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 30.

⁶⁵ Farida R. Wargadalem, *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik 1804-1825*, hal. 242.

Pemerintah Belanda memperkenalkan sistem pemerintahan bentuk baru yang membuat rakyat Palembang merasa “asing” dan tidak nyaman. Apalagi mereka dihadapkan pada berbagai pungutan atas tanah yang telah mereka huni dan garap dari nenek moyang mereka. Menurut mereka, semua tanah adalah milik sultan yang boleh dikelola sebaik-baiknya demi kepentingan mereka sendiri. Jika mereka harus menyerahkan sesuatu kepada sultan, itu berupa hasil bumi dan tenaga. Semua kewajiban rakyat kepada sultan dirasakan rakyat tidak memberatkan dan dikaitkan sebagai bakti terhadap “junjungan” mereka yang berkedudukan di ibu kota kesultanan. Di kalangan rakyat Palembang berkembang rasa “menolak” atas kehadiran “orang-orang *kafir*” di wilayah mereka. Penolakan itu berubah menjadi aksi perlawanan di bawah para pemimpin tradisional (*depati* dan ulama) setempat terhadap pemerintah Belanda. Di kota Palembang, kelompok yang ingin kembali kepada kondisi lama jumlahnya cukup besar yang terdiri dari keturunan bangsawan atau priyayi. Pada mulanya mereka masih menduduki posisi penting dalam kehidupan sosial di pusat pemerintahan, namun posisi mereka semakin turun seiring kemiskinan yang melanda. Di bawah pimpinan Pangeran Bupati Panembahan dan adik Sultan Ahmad Najamuddin IV Prabu Anom, bersama-sama dengan keluarga bangsawan lainnya menggalang kekuatan menolak pemerintah Belanda. Mereka bermaksud mengembalikan kekuasaan lama. Akan tetapi, di mata pemerintah Belanda penolakan itu tidak akan berkembang, karena penduduk Palembang tidak memiliki dukungan dana atau kemampuan luar biasa untuk mewujudkannya. Dengan demikian, usaha pemiskinan terhadap golongan bangsawan merupakan sarana efektif membuat

mereka “diam”, sehingga usaha-usaha mereka untuk menggalangkan kekuatan tidak akan banyak membantu mereka untuk kembali kepada masa lalu. Kejayaan masa lalu itu hanya layak dikenang tanpa “kemampuan” yang memadai untuk kembali ke masa itu.⁶⁶

Menghadapi situasi yang ada memaksa golongan bangsawan untuk bertahan. Salah satunya cara tetap “memamerkan” sedikit kekayaan masa lalu dengan tetap mempertahankan budak dan *anak semang*. Mereka hidup dalam sisa-sisa kebesaran masa lampau yang telah redup. Hal itu akan memicu terjadinya ledakan kekecewaan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Bara itu tumbuh mulai dari kalangan bangsawan dan menjalar ke rakyat. Penggabungan dua kubu itu akan memunculkan kekuatan baru untuk melawan Belanda. Sementara itu, kondisi di *uluan* berbeda dengan di ibu kota. Penduduk ibu kota tidak dapat bertani, sedangkan penduduk *uluan* sebagian besar hidupnya dari pertanian, perkebunan serta hasil hutan. Akibatnya, kehidupan di *uluan* tidak merosot sebagaimana terjadi di ibu kota Palembang.⁶⁷

Pemerintah Belanda selanjutnya menyederhanakan sistem pemerintahan di Palembang, melalui keputusan komisaris jenderal pada 16 Agustus 1826 dalam Lembaran Negara nomor 37. Pos-pos yang ada disederhanakan dengan cara menggabungkannya, dan mengurangi gaji pegawai, sehingga mampu melakukan penghematan sebesar f. 26.942. Kebijakan itu diambil karena masih tingginya biaya dalam menjalankan roda pemerintahan di Palembang. Situasi itu membuat Muntinghe (Anggota Dewan Hindia Belanda) pada 1827 mengusulkan agar

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 242-243.

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 243.

pemerintah Belanda mengangkat kembali sultan, yang akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah Belanda. Sultan tersebut akan diikat dalam suatu kontrak yang didalamnya menyebutkan bahwa kopi dan lada harus diserahkan kepada pemerintah Belanda dengan harga yang telah ditentukan. Muntinghe berharap meniru sebagaimana dahulu diberlakukan oleh VOC. Usul itu ditolak oleh Van Sevenhoven dengan mengingatkan pemerintah Belanda akan kelicikan para kaum priyayi Palembang yang senantiasa “berkhianat” terhadap Belanda. Ia juga memaparkan prospek masa depan yang akan diperoleh dari Palembang melalui pajak tanah dan pemasukan lainnya. Tampaknya pemerintah Belanda di Palembang cenderung menerima pendapat Van Sevenhoven daripada Muntinghe. Terbukti yang berlaku di Palembang adalah diteruskannya sistem pajak dan pemerintahan penduduk hanya diwakili oleh Perdana Menteri.⁶⁸

Sesudah Sultan Mahmud Badaruddin II meninggal tahun 1852, menjadi pertanyaan aktual apakah anggota keluarga sultan boleh pulang ke Palembang dari tempat pengasingan mereka di bagian timur Nusantara itu. Pada mulanya, permintaan anggota keluarga Sultan Mahmud Badaruddin II untuk kembali ke ibu kota Palembang ditolak oleh residen Palembang. Akan tetapi, orang-orang Palembang yang diasingkan ini diperbolehkan meninggalkan Ternate dan selanjutnya menetap di Banyuwangi, dan di sana mereka akhirnya pada tahun 1863 diizinkan pulang ke Palembang.⁶⁹

Akan tetapi, setibanya di Palembang mereka tidak disambut dengan hangat. Anggota keluarga raja yang tetap tinggal di Palembang merasa keberatan

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 243-244.

⁶⁹ Jeroen Peeters, *Kaum Mudo-Kaum Tuo Perubahan Religijs di Palembang 1821-1942*, hal. 25.

untuk membantu kerabat yang jatuh miskin ini. Ketegangan antara keluarga Sultan Mahmud Badaruddin II dengan keluarga bangsawan lain akan segera muncul ke permukaan. Sebelum mereka bertolak ke Ternate, berbagai orang buangan meminta Panembahan Bupati menyimpan barang berharga mereka, sampai mereka kembali lagi ke Palembang. Selama pengasingan, mereka telah mencoba mendapatkan kembali barang-barang itu, namun tanpa hasil. Ketika kembali ke Palembang, dimulai lagi usaha menuntut barang-barang simpanan tadi. Tetapi, Panembahan Bupati yang sudah sangat tua tetap menolak semua tuntutan. Yang dirugikan antara lain Pangeran Prabu Menggala, yang sesudah wafatnya Sultan Mahmud Badaruddin II menjadi pemimpin cabang keluarga saja. Ia pernah kawin dengan putri Panembahan, yang tetap tinggal bersama ayahnya di Palembang. Ketika kembali, ternyata tidak saja istrinya yang meninggal, tetapi dengan kematiannya hilang pula barang yang ditinggalkan para istrinya. Namun ketika nasib barang ini ditanya, iparnya, Pangeran Surianandita Zen, yang menjadi pemimpin keluarga sesudah Panembahan Bupati meninggal, tetap berkuat untuk menghiraukan semua hak keuangan.⁷⁰

Sesudah usaha pengembalian gagal, pada tahun 1865 cucu-cucu Sultan Mahmud Badaruddin II mulai mengambil sikap lebih keras. Dibawah pimpinan Raden Hanafiah sekitar 20 orang dari mereka bersumpah secara rahasia di pemakaman sultan di Lemabang, untuk saling membantu tanpa syarat. Dengan bantuan kelompok ini Raden Muhammad Hanafiah selanjutnya mencoba membujuk Pangeran Surianandita Zen untuk mengembalikan sebagian dari

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 25-26.

warisannya. Satu-satunya hasil tindakan ini ialah *pangeran* mengadukan kerabatnya kepada residen dengan tuduhan bahwa mereka telah berkomplotan untuk menjatuhkan kekuasaan Belanda. Baru sesudah pemeriksaan yang mendalam terungkap hal ihwal yang sebenarnya, dan kemudian persekutuan Raden Hanafiah dibubarkan atas perintah residen.⁷¹

Ketegangan yang dengan cara ini muncul ke permukaan tahun 1865, hanya akan bertambah dengan waktu. Karena sebagian besar priyayi kini tidak lagi memiliki kekayaan sendiri, mereka yang kembali dari pengasingan di Ternate dan Banyuwangi harus hidup dengan tunjangan kecil sehingga uang pribadi bertambah besar. Karena tidak lagi mampu untuk memelihara pengikut mereka, pengaruh besar priyayi di kalangan bawah lenyap sama sekali, sehingga mereka tidak lagi dianggap sebagai ancaman politik oleh Belanda. Sebaliknya pensiun yang dibayar kepada para priyayi menyebabkan mereka semakin tergantung pada penguasa kolonial. Walaupun demikian, ketergantungan ini tidak mengurangi ketegangan politik di Palembang. Semakin terancam mobilitas sosial yang negatif, priyayi berpegang erat pada hak pensiun mereka. Penuh ketakutan mereka menantikan pergantian generasi, sejalan dengan makin lanjutnya usia generasi pertama yang berhak menerima tunjangan. Priyayi tua ini kemudian berusaha keras menyerahkan hak tunjangan mereka kepada generasi berikutnya. Tetapi, pandangan demikian tidak dimiliki pemerintah Belanda, yang melihat pergantian generasi sebagai kesempatan yang baik untuk mengakhiri hak istimewa ini. Dengan makin banyaknya arus uang pensiun yang dipotong, makin meningkat

⁷¹ *Ibid.*, hal. 26.

ketegangan selama tahun 70-an. Menjelang tahun 1880, penghapusan semua hak istimewa makin mendekat, ketika diputuskan untuk memasukkan priyayi ke dalam register pajak. Peraturan pajak yang tidak populer ini, oleh banyak priyayi dianggap sebagai penghinaan sosial. Kantor Karesidenan Palembang kemudian dibanjiri permintaan para priyayi untuk menghapuskan penetapan pajak.⁷²

⁷² *Ibid.*, hal. 26.